

JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

(Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Syariah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Abdul Rahman Ramli

NIM: I000110025

NIRM: 11/X/02.1.2/0252

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : **M. Muhtarom, SH., MH.**

Sebagai : Pembimbing I

NIK/NIP : 381

Nama : **Drs. Syarafuddin, M. Ag.**

Sebagai : Pembimbing II

NIK/NIP : 439

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Abdul Rahman Ramli

NIM : I000110025

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

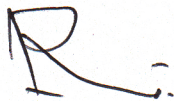
Judul Skripsi : **JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**
(Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/V/2010)

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

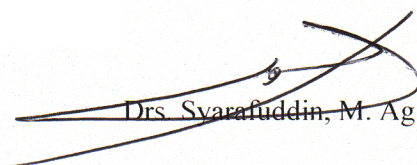
Surakarta, 30 Juni 2015

Pembimbing I,



M. Muhtarom, SH., MH.

Pembimbing II,



Drs. Syarafuddin, M. Ag.

**JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
(Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)**

Oleh : Abdul Rahman Ramli

(NIM: I000110025)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayarannya diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang ditentukan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini membuat begitu banyak institusi perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan produk cicil emas. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis ini sangat menggiurkan. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai, akan tetapi dalam hadits-hadits yang ada seperti hadits dari Abu Sa'id al-Khudriy ra., dan Ubadah bin Shamit ra., menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya.

Tetapi dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (*mubāh*), selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murābahah*. Menarik untuk dikaji alasan fatwa ini dikeluarkan dan kesesuaian *istinbāt* hukum DSN-MUI dengan *istinbāt* hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis yang berupa pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbāt* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāh*. Kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode *istinbāt* hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Quran, hadis, *ijma`* para ulama dan menggunakan metode *qiyāsi*.

Kata Kunci : Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam kalam-Nya al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan makanan riba, melarang menghambur-hamburkan harta,

perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal bermuamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama.

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (*mubāh*).

Sedangkan dalam hadits-hadits yang ada seperti hadits dari Ubadah ibnu Shamit, Imam Asy Saukani menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya¹.

Begitu juga dalam *istinbat* hukumnya, DSN-MUI justru menggunakan hadits-hadits yang hampir kesemuanya melarang jual beli emas secara tidak tunai hanya saja pembolehan jual beli emas ini merujuk pada pendapat-pendapat ulama dan itupun sebagian kecil, sementara mayoritas ulama melarang jual beli

emas secara tidak tunai dengan alasan emas merupakan komoditi ribawi².

Rumusan Masalah

1. Apa alasan DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai?
2. Bagaimana keabsahan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang pada *istinbat* hukumnya hanya merujuk pada sebagian kecil pendapat ulama dan menggunakan hadis-hadis yang hampir semuanya melarang jual beli secara tidak tunai?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai.
2. Untuk mengetahui keabsahan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

¹Ibnu Hajar al-Asqalanai, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 397

²Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 41-42

Tinjauan Pustaka

1. Chairul Afnan (UIN Sunan Kalijaga, 2013) dalam skripsinya yang berjudul "*Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)*". Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa fatwa jual beli emas secara tidak tunai muncul karena dilatar belakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat saat ini dan juga keluarnya fatwa ini pada dasarnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah, secara filosofis fatwa ini sebaiknya ditinjau ulang untuk kemaslahatan umat, secara metodologis fatwa ini hanya menitik beratkan pada minoritas ulama yang ada.
2. Vian Prasetyo (IAIN Walisongo, 2013) dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai*". Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa alasan DSN-MUI membolehkan jual beli emas secara tangguh adalah: *Pertama*, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tata cara/ tukar menukarnya adalah secara kontekstual, menjadikan hasil dari *istinbāṭ* mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāḥ*. *Kedua*, DSN-MUI tidak beristinbāṭ secara langsung akan tetapi dalam merumuskan fatwa, mereka mengambil dari *istinbāṭ* yang dilakukan oleh ulama mazhab yang membolehkan, kemudian dijadikan dalil penguat dalam *istinbāṭ* mereka. *Ketiga*, pada

zaman sekarang ini keadaan telah berubah semua, maka emas sudah bukan lagi menjadi alat tukar, akan tetapi menjadi barang seperti umumnya.

3. Ryco Putra Irawan (UIN Syarif Hidayatullah, 2014) dalam skripsinya yang berjudul *“Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa: *Pertama*, menurut ulama empat mazhab bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka juga memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap memiliki sifat nilai, serta emas

merupakan barang yang ditimbang dan ditakar, karena barang yang ditimbang, atau ditakar sama dengan jenis harta yang berpotensi riba. *Kedua*, ulama Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim berpendapt bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeliakan seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam peertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harta (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan

barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Penelitian-penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penelitian ini lebih menekankan pada kesesuaian metode *istinbāt* hukum DSN-MUI dengan metode *istinbāt* hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. Dengan demikian, masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini merupakan masalah yang baru untuk diteliti.

Kerangka Teoritik

1. Pengertian Jual Beli.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu

yang lain³. Menurut istilah *al-Bai'* berarti akad yang diadakan atas dasar tukar menukar harta, yang berakibat adanya pertukaran hak milik dengan tidak dibatasi waktu⁴.

2. Sumber Hukum Jual Beli⁵

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' para Ulama, yaitu:

a. Al-Qur'an,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁶. (QS: al-Baqarah (2): 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ

³M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

⁴Harun dan Slamet Warsidi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Jilid I* (Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS, 2001), hlm. 35.

⁵M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54-57.

⁶Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 58.

مَنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا
هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tahu⁷. (QS: al-Baqarah (2): 198).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu⁸. (QS: al-Nisā' (4) : 29).

b. Sunnah.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi` r.a, bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik" (HR. Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim)⁹.

c. Ijma` para Ulama

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain yang

⁸Ibid, hlm. 29-30.

⁹Ibnu Hajar al-Asqalanai, Terjemahan Bulughul Maram, hlm. 371

⁷Ibid, hlm. 38.

dibutuhkannya itu harus dengan barang lainnya yang sesuai¹⁰.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli¹¹.

a. Rukun-rukun jual beli

- 1) Ada penjual dan pembeli.
- 2) Ada barang yang diperjual belikan
- 3) *Ījāb qabūl* (ikrar atau akad)
- 4) Nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat-syarat jual beli

- 1) Berakal, tidak gila atau bodah.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- 3) *Balīg* (berumur 15 tahun keatas atau dewasa), adapun anak-anak yang sudah

mengerti tetapi belum balik *balīg* menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil.

- 4) Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan sebagai barang najis.
- 5) Barangnya dapat dimanfaatkan, barang yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia.
- 6) Barang milik orang yang melakukan akad atau pemilik sah dari barang tersebut telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang.

- 7) Barang dapat diserahkan.

¹⁰Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulam Kontemporer tentang Hukum Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 28.

¹¹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan...*, hlm. 57.

Barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

- 8) Barang dapat diketahui dengan jelas. Barang dapat diketahui dengan jelas maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

4. Macam-macam Jual Beli¹².

- a. Jual beli pada umumnya (menukar uang dengan barang)
- b. Jual beli *al-ṣarf* (menukar uang dengan uang)
- c. Jual beli *muqayyadah* (menukar barang dengan barang)
- d. Jual beli *bargainal* (penjual tidak memberitahukan modal barang)

e. Jual beli amanah (penjual memberitahukan modal barang)

- f. Jual beli *muzayyadah* (lelang)
- g. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
- h. Jual beli dengan pembayaran tertunda
- i. Jual beli dengan barang tertunda
- j. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual-beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang *ribawi*¹³ dikarenakan 'illah nya sama yaitu sebagai patokan harga dan

¹²Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90-91.

¹³Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Semarang: IAIN Walisongo. 2013), hlm. 20.

merupakan sebagai alat pembayar, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Dan dikarenakan sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.

Jika seseorang menjual barang yang mungkin mendatangkan riba (barang ribawi), bukan berdasarkan jenisnya, maka di sini ada dua persoalan. *Pertama*, jika barang itu dijual dengan barang yang tidak sepakat dalam *'illah* riba, misalnya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, maka tidaklah ada riba padanya. Kedua, jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam sifat (*'illah*) riba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual

dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”¹⁴.

Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat:

- a) Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.
- b) Spontan, artinya seketika itu juga.
- c) Saling bisa diserahkan terimakan.

¹⁴*Ibid*, hlm. 21.

Para ulama telah sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan.

Riba pinjaman terbagi dua yaitu riba jahiliyah dan riba utang-piutang, sedangkan riba jual beli juga terbagi dua yaitu *tafaḍul* dan *nasīah*. Pada transaksi jual beli emas ini masuk kepada riba jual beli yaitu jika:

- a) Riba *tafaḍul*, yaitu riba dengan kelebihan pembayarannya¹⁵, atau tambahan dalam salah satu barang yang dipertukarkan. *‘illah* nya menurut Ibnu Taymiyyah adalah takaran, atau timbangan. Makna “pelebihan pembayarannya”

adalah tidak sama ukurannya.

- b) Riba *nasīah*, yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang *‘illah* nya (alasannya) sama dengan cara tidak tunai¹⁶.

6. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Jual Beli Secara Tidak Tunai.

Para ulama mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal) secara garis besar pendapat mereka mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai. Adapun alasan mereka sebagai berikut:.

Dinyatakan dalam hadis ‘Ubadah bin Shamit ra, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani. 2007), hlm.705.

¹⁶Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa...*, hlm. 22.

بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا
 بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
 فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya"*¹⁷. (HR. Muslim).

Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijmak ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, akan tetapi 'illah emas dan perak berbeda dengan yang lainnya¹⁸. Menurut Malik dan Syafi'i dikarenakan 'illah barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda

tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang. Menurut Imam Syafi'i 'illah keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli Atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui Imam Malik.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 'illah keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula dan sama hukumnya¹⁹.

¹⁷Kitab 9 Imam Hadist, *Shohih Muslim*, hadis no. 2970, Lidwa Pusaka i-Software.

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1993), hlm.340-343.

¹⁹Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, Jilid V (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2003), hlm.

7. Metode *Istinbāt* Hukum

a. Pengetian *Istinbāt* Hukum

Istinbāt hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan²⁰.

b. Bentuk-bentuk *Istinbāt* Hukum Islam

1) Metode *Bayānī*.

Dalam khasanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qāwa'id al-uṣūliyyah al-lugawiyyah*, atau *dilalat al-lafz*. Inilah yang

disebut dengan metode *bayānī*, yaitu metode *istinbāt* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *naṣṣ* dan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab²¹.

2) Metode *Ta'līlī*.

Metode ini digunakan untuk mengali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *naṣṣ* baik secara *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*, dan tidak juga ada ijmak yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada,

262.

²⁰Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), hlm. 2.

²¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama. 1994), hlm. 1

berdasarkan kegunaan dan kedudukannya, *'illah* dibagi menjadi *'illah tasyrī'* dan *'illah qiyāsi*.

3) Metode *Istiṣlāḥī*.

Dimaksudkan dengan *Istiṣlāḥī* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayānī* dan *ta'wīlī* tidak dapat dilakukan.

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqāṣid*) yang ingin dicapai

dan dipertahankan oleh syariat melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *darūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah*²².

8. Dasar-dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI²³

Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

²²*Ibid*, hlm. 313.

²³Zaenul Mahmudi, *MUI dan Metode Istimbāt Hukumnya*. http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:mui-dan-metode-istinbath-hukum-nya&catid=35:artikel&Itemid=210 diakses 5 Juli 2015.

U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997 yang berbunyi:

a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijmak, *qiyās* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, maṣlaḥa mursālah, dan saddu *al-ẓari'ah*.

c. Sebelum mengambil Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang

berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

9. Teori Pendekatan dalam Memahami Hadis²⁴

Ada beberapa pendekatan dalam memahami hadis Nabi Muhammad Saw, karena pendekatan studi dalam kedua aspek yaitu sanad dan matan ini sangat diperlukan agar studi hadis tidak salah arah dan sasaran. Sehingga hadis Nabi dapat dipahami secara tekstual maupun

²⁴Siti Fatimah, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 79-83.

kontekstual, Sosiologis seperti Pendekatan bahasa, sosiologis, historis, sosio-historis, dan pendekatan psikologis.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka seluruh penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap buku-buku dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan²⁵.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai fatwa-fatwa DSN, khusus fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai, kemudian menganalisis fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan melihat alasan dan kesesuaian metode

istinbāt hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan metode *istinbāt* hukum MUI.

Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan sebagainya²⁶. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku, tulisan, fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa ini adalah hadis Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadis yang baik dalam pendekatannya menurut Yusuf Qardawi salah satunya dengan

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 244.

²⁶*Ibid*, hlm. 231.

memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya satu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan ('illah) tertentu. Yang dikemukakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang .

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk kajian apa ia diucapkan, sehingga dengan demikian maksud dari hadis tersebut benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya .

Menurut DSN-MUI hadis ini mengandung '*illah* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut.

Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama²⁷.

Kesimpulan

1. Mengenai alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa

²⁷*Ibid*, hal. 9.

DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbāt* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubāh*, dengan syarat selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murābahah*.

2. Berdasarkan hasil analisis fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010, fatwa ini sudah

sesuai dengan metode *istinbāt* hukum MUI yang mempelajari keempat sumber hukum Islam dalam mengeluarkan fatwa ini, yaitu; al-Qur`an, Hadis, Ijma`, dan Qiyās. Hal ini sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pasal 3. Dalil al-Qur`an yang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkan jual beli dalam surat *al-Baqarah* ayat 275, sementara hadis yang digunakan, secara tekstual hampir kesemuanya melarang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun pendapat ulama yang dijadikan sebagai rujukan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai adalah pendapat Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah, Syaikh 'Ali Jumu'ah (mufti al-Diyar al-Mishriyah), Syekh Abdullah bin

Sulaiman al-Mani', Syeikh Abdurahman As-Sa'di dan Ibnul Qayyim yang secara garis beras perpendapat bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Saran

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi perbankan

syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan syariah.

2. Penulis menyarankan bahwa apabila seseorang masih ragu melakukan jual beli emas dengan transaksi tidak tunai seperti ini yang dikhawatirkannya ia akan terjerumus kedalam riba maka lebih baik menghindari jual beli emas secara tidak tunai.

Daftar Pustaka :

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. 2003. *Mutiara Hadits 5*, Jilid V. Jakarta: Bualn Bintang.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

- al-Asqalanai, Ibnu Hajar. 2000. *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- DSN-MUI. 2010. *Naskah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta: DSN-MUI.
- Depatemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Harun dan Warsidi, Slamet. 2001. *Buku Ajar Fiqh Muamalah Jilid I*. Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2014. *Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia.
- Idris, Abdul Fatah dan Ahmadi, Abu. 1990. *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkasan Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Uşul al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.
- Mas'adi, Ghufroon A. 1998. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 1993. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. Bandung: Karisma.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaḍid*, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Syibly, M. Roem dan Mu'allim, Amir. 20013. *Ijtihad Ekonomi Islam Modern*. Paper. Yogyakarta: Pascasarjana FIFAI UII.
- Yahya, Muhtar. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqh*, terj. Saifullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Afnan, Chairul. 2013. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010*. Skripsi, <http://digilib.uin-suka.ac.id/9275/>, di 15 April 2015.

- Fatimah, Siti. *Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail)*. Skripsi, <http://digilib.uin-suka.ac.id/.../Bab%20I,%20V,%20Daftar%20Pustaka>, diakses 5 Juli 2015
- Mahmudi, Zaenul. 2010. *MUI dan Metode Istimbāṭ Hukumnya*. http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:mui-dan-metode-istinbath-hukum-nya&catid=35:artikel&Itemid=210 diakses 5 Juli 2015.
- Irawan, Ryco Putra. 2014. *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*. Skripsi, <http://respository.uinjkt.ac.id/RycoPutraIrawan>, diakses 15 April 2015.
- Syibly, M. Roem dan Mu`allim, Amir. 2013. *Ijtihad Ekonomi Islam Modern*. Jurnal, http://eprints.uinsby.ac.id/308/1/Buku%204%20Fix_11.pdf, diakses 24 April 2015.
- Prasetyo, Vian. 2013. *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Skripsi, <http://Eprints.walisongo.ac.id/730/>, diakses pada 15 April 2015.